

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMERINTAH DAERAH

**Sri Rustiyaningsih<sup>1</sup>**

**Intan Immanuela<sup>2</sup>**

*Program Studi Akuntansi - Fakultas Ekonomi  
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*

### ABSTRACT

*The aims of this study were to investigate the effects of local government characteristics in Indonesia (size, local revenues, intergovernmental transfer, total expenditures, liabilities, population), and BPK audit findings on the performance of local governments. The sample was the local governments in Indonesia which presented the complete data. The secondary data were collected using documentary method, and the hypotheses testing applied multiple regression analysis. The results showed that the size, intergovernmental transfer, total expenditures, liabilities, and BPK audit findings were not significant toward the performance of local governments. While, local revenues and population were significant toward the performance of local governments.*

**Key words:** *local government characteristics, BPK audit findings, local government performance*

### A. Pendahuluan

Daerah mempunyai kewenangan seluas-luasnya untuk mengelola pemerintahan dan menjalankan roda pemerintahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun daerah juga dituntut mempertanggungjawabkan pengelolaan pemerintahan tersebut kepada rakyat dalam bentuk akuntabilitas horisontal dan pertanggungjawaban kepada anggota dewan sebagai perwujudan akuntabilitas vertikal dengan menyajikan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk laporan kinerja keuangan yang telah dicapai selama satu periode. Pemerintah melalui PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mewajibkan setiap entitas pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan.

Di samping itu pemerintah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. PP No.6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PEPPD) merupakan landasan hukum dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Departemen Dalam Negeri telah melakukan penilaian kinerja terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan menyajikan perankingan berdasarkan hasil kinerja tiap provinsi, kota, dan kabupaten. Skor nilai tersebut

menggambarkan seberapa baik kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## B. Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis

Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik di luar negeri maupun di Indonesia menemukan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, di antaranya penelitian Patrick (2007) dalam Sumarjo (2010) tentang karakteristik pemda yang meliputi budaya organisasi, struktur organisasi, dan lingkungan eksternal. Selain itu dari hasil penelitian Sumarjo (2010) menemukan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah, *leverage*, dan *intergovernmental transfer* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi ukuran legislatif atau DPRD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemda. Widya dan Debby, (2012) menemukan hasil penelitian bahwa ukuran pemda yang diukur dengan *log natural (ln) asset* pemda, tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan PAD, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, belanja daerah, dan temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemda.

Dalam penelitian ini menambahkan variabel jumlah penduduk sebagai variabel independen dan menggunakan data penelitian tahun 2010. Penambahan variabel jumlah penduduk didasarkan pada landasan teoretis bahwa otonomi daerah yang dilakukan di Indonesia haruslah melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian semakin banyak jumlah penduduk maka partisipasi mereka juga akan tinggi sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik.

Kemampuan kapasitas fiskal pemerintah daerah di Indonesia tidak sama, hal ini disebabkan karena sumber daya yang dimiliki tiap pemerintah daerah tidak sama. Ada perbedaan karakteristik pemerintah daerah di Indonesia, terutama antara di Jawa - Bali dan di luar Jawa. Hal ini dibuktikan oleh Halim (2001) dalam penelitiannya yang menemukan kinerja pemerintah di Jawa-Bali dan di luar Jawa berbeda. Beberapa peneliti terdahulu menjelaskan karakteristik pemerintah daerah meliputi budaya organisasi, struktur organisasi dan lingkungan eksternal (Patrick, 2007 dalam Sumarjo, 2010). Sedangkan Suhardjanto et al, (2010) dalam Sumarjo, (2012) menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dari struktur organisasi yang terdiri atas *size* daerah, *wealth*, *functional differentiation*, *age* dan latar belakang pendidikan kepala daerah, sedangkan lingkungan eksternal diprosikan dengan *municipality debt financing* dan *intergovernmental revenue*. Puspita dan Martani (2012) dalam penelitiannya tentang karakteristik pemda salah satunya diukur dengan kompleksitas pemerintahan yang diprosikan dengan jumlah penduduk.

Daerah yang memiliki sumber daya besar maka daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk menyediakan layanan publik yang baik. Daerah yang memiliki kekayaan tinggi akan mampu meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik sehingga daerah tersebut akan mempunyai kinerja yang baik.

Hasil penelitian Sumarjo (2010) menjelaskan ukuran (*size*) pemda berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda. Demikian juga hasil penelitian Widya dan Debby (2012) juga menemukan ukuran (*size*) pemda berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemda kota/kabupaten.

**H1: ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah**

Saragih (2003) menjelaskan bahwa peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah yang pertumbuhan ekonominya positif akan mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Infrastruktur yang meningkat akan berdampak terhadap meningkatnya investasi dan akan meningkatkan pula PAD. Selaras dengan Adi (2006) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD hendaknya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) menemukan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda karena kecilnya peran PAD, akan tetapi hasil penelitian Widya dan Debby (2012) menemukan bukti sebaliknya bahwa PAD berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda.

**H2: pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja pemda**

Belanja daerah akan meningkatkan layanan publik, sehingga akan meningkatkan kinerja pemda. Belanja daerah terdiri atas belanja rutin/belanja operasional dan belanja modal/belanja pembangunan. Hasil penelitian Fitriyanti dan Pratolo (2009) dalam Sumarjo (2010) menemukan bukti bahwa belanja pembangunan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Widya dan Debby, (2012) juga menemukan bukti empiris bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap skor kinerja pemda.

**H3: belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja pemda**

Pemerintah daerah yang memiliki pinjaman tinggi maka akan menggambarkan bahwa kinerja pemda tersebut rendah, sebaliknya bila struktur pendanaan pemda dari pinjaman kecil/rendah maka akan menunjukkan kinerjanya bagus. Hal ini dikarenakan pinjaman akan memberikan dampak pada penurunan kinerja di kemudian hari dengan kewajiban pelunasan dan pembayaran bunga yang akan membebani pemda tersebut. Besarnya pinjaman juga menggambarkan ketidakmampuan pemda dalam membiayai kegiatan pelayanan publik dengan kemampuan internal organisasi. Hasil penelitian Sumarjo (2010) dan hasil penelitian Widya dan Debby (2012) sama-sama menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja pemda.

**H4: *leverage* berpengaruh terhadap kinerja pemda**

Hasil penelitian Halim,(2003) menemukan bahwa pemerintah daerah di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali memiliki perbedaan kemampuan keuangan. Dari data

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat dilihat secara deskriptif bahwa pemerintah daerah sebagian besar memiliki struktur pendapatan yang lebih besar berasal dari dana perimbangan jika dibandingkan dengan jumlah PAD. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya dana perimbangan maka kinerja pemda akan lebih baik karena sumber daya pemda yang berbeda-beda dapat ditutup dengan pendanaan berupa dana perimbangan. Semakin tinggi dana perimbangan maka kinerja pemda akan semakin baik.

Hasil penelitian Sumarjo (2010) membuktikan secara empiris bahwa *intergovernmental revenue* (dana perimbangan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Widya dan Debby (2012) juga menemukan bukti empiris bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemda.

**H5: tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda**

Jumlah penduduk di Indonesia yang besar menuntut pelayanan publik yang lebih banyak dan merata. Semakin banyak penduduk semakin banyak permasalahan yang dihadapi pemda sehingga pemda harus bekerja lebih keras dan mengalokasikan belanja dengan baik agar dapat menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti yang diamanatkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan mendorong semakin tingginya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penganggaran khususnya. Hasil penelitian Sopanah (2003) menemukan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap penganggaran daerah. Ini berarti semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin baik kinerja keuangan pemda.

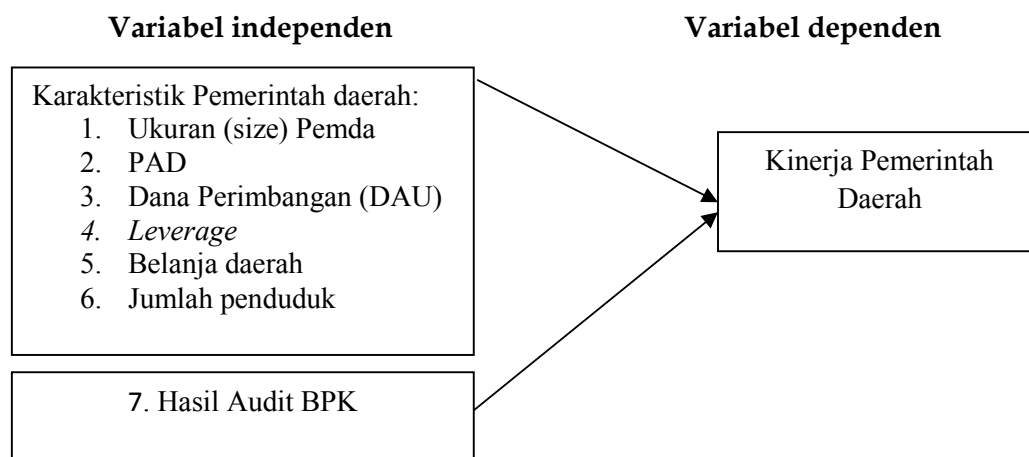
**H6: jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja pemda**

Audit sektor publik yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah khususnya akan menghasilkan opini audit terhadap laporan keuangan dan pengendalian internal serta audit ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil audit menjelaskan temuan audit yang menggambarkan pelanggaran atau penyelewengan yang terjadi. Pemda yang dalam laporan keuangannya banyak ditemukan temuan maka mengindikasikan bahwa kinerjanya jelek, demikian sebaliknya pemda yang temuan auditnya rendah akan menunjukkan kinerja yang baik.

Penelitian Bernstein (2000) dalam Widya dan Debby (2012) menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara pengukuran kinerja pemda dengan sistem pengawasan, termasuk audit kinerja dan evaluasi program. Hasil penelitian Widya dan Debby (2012) menunjukkan bahwa hasil temuan audit berpengaruh terhadap skor kinerja pemda.

**H7: hasil Audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemda**

Model penelitian yang menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian

### C. Metode Penelitian

Populasi dan sampel penelitian ini adalah pemerintah daerah kota/kabupaten di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki data lengkap. Data berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca daerah, laporan hasil audit BPK, hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan jumlah penduduk.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Variabel ini diukur dengan skor nilai berdasarkan pemeringkatan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dirjen Depdagri dalam bentuk ranking.

Variabel independen penelitian ini terdiri atas:

#### 1. Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri yang membedakan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain. Dalam penelitian ini karakteristik pemerintah daerah meliputi:

##### a. Ukuran (*size*) pemerintah daerah,

Aset daerah seringkali digunakan sebagai proksi untuk mengukur ukuran (*size*) pemerintah daerah. Aset pemda menunjukkan banyaknya sumber daya yang dimiliki daerah untuk kepentingan layanan masyarakat. Ukuran (*size*) pemerintah daerah diukur dengan *log natural* (ln) total aktiva pemda. Pengukuran ini sejalan dengan skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti terdahulu Sumarjo (2010) dan Widya dan Debby (2012).

##### b. Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Variabel PAD diukur dengan total pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan

- c. Dana Perimbangan/Tingkat Ketergantungan terhadap pemerintah pusat,  
Dana perimbangan merupakan dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dalam penelitian ini variabel dana perimbangan/tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat diukur dengan membagi dana alokasi umum (DAU) dengan total pendapatan
- d. Belanja daerah,  
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran untuk membiayai pengeluaran daerah yang berupa belanja rutin/operasional dan belanja modal. Variabel belanja daerah diukur dengan *log natural* (ln) total realisasi belanja. Karena besarnya belanja pemda biasanya dalam angka absolut yang besar sedangkan variabel lain menggunakan skala pengukuran rasio. Pengukuran variabel ini mengacu pada penelitian Widya dan Debby (2012).
- e. Jumlah penduduk, diukur dengan *log natural* (ln) jumlah penduduk pada pemda setempat.

## 2. Hasil Pemeriksaan (Audit) BPK

Variabel ini menunjukkan temuan audit yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan pemda. Variabel ini diukur dengan banyaknya temuan dalam rupiah dibagi total anggaran. Pengukuran variabel ini mengacu pada penelitian Widya dan Debby (2012).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan persamaan regresi :

$$\text{KINERJA} = \alpha + \beta 1 \text{ UKURAN} + \beta 2 \text{ PAD} + \beta 3 \text{ DAU} + \beta 4 \text{ BELANJA} + \beta 5 \text{ LEVERAGE} + \beta 6 \text{ PENDUDUK} + \beta 7 \text{ AUDIT} +$$

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian normalitas data, pengujian heteroskedastisitas, pengujian autokorelasi, dan pengujian multikolinearitas. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi < 0,05, sebaliknya jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemerintah daerah yang digunakan sebagai sampel penelitian ini adalah 462 kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah daerah yang menyajikan data tidak lengkap sebanyak 83. Hanya saja tidak semua kabupaten/kota menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Di samping itu juga data dibuang karena memiliki nilai Z score di atas 3 dan lebih kecil dari -3 (Ghozali, 2005). Pemerintah daerah yang datanya dibuang sebagai *outlier* karena nilai z score lebih dari  $\pm 3$

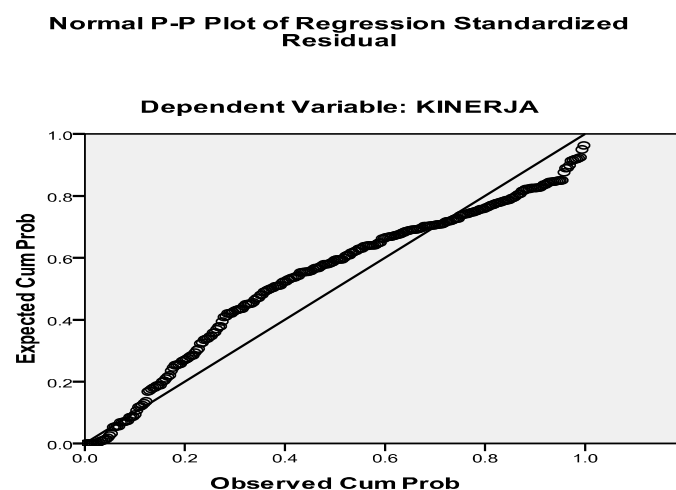
sebanyak 85. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 275 pemerintah daerah.

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
KINERJA	2.468769	.4629783	275
DAU	.606957	.1112342	275
PAD	.059086	.0397002	275
AUDIT	.061227	.1808617	275
Insize	27.9781	.68040	275
Inbelanja	27.0369	.91625	275
Inleverage	21.8878	2.11907	275
Inpenduduk	12.6239	.91513	275

Tabel 1 menunjukkan hasil statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian. nilai rata-rata (mean) untuk variabel kinerja pemda 2,468769, untuk variabel dana perimbangan (DAU) yang dihitung dari rasio DAU dengan pendapatan sebesar 0,606957. Rasio PAD memiliki rata-rata 0,059086, rata-rata nilai rasio hasil temuan audit BPK terhadap pendapatan sebesar 0,061227. Rata-rata *log natural* dari aset sebesar 27,9781, *log natural* belanja 27,0369, *log natural leverage* 21,8878 dan *log natural* jumlah penduduk sebesar 12,6239.

Hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan P-P plot disajikan dalam gambar 2, diperoleh hasil bahwa data berdistribusi normal karena data penyebar mengikuti garis diagonal.



**Gambar 2. Hasil uji normalitas data**

Pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson. Dari pengujian Durbin-Watson pada tabel 2 diperoleh nilai DW 1,605 sedangkan nilai Durbin-Watson tabel pada sampel (n) = 275 dengan variabel independen (k) = 6 dengan nilai signifikansi ( $\alpha$ ) 5% diperoleh nilai DW tabel dl sebesar 1,707 dan du sebesar 1,831. Dari hasil tersebut nilai DW terletak/berada di bawah dl sehingga tidak dapat disimpulkan ( $1,605 < 1,707$ ). Menurut Santoso, (2001) jika hasil Durbin Watson lebih dari -2 dan kurang dari +2 maka dikatakan model regresi tidak terjadi autokorelasi

**Tabel 2. Hasil Uji F Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.405 <sup>a</sup>	.164	.142	.4287616	.164	7.497	7	267	.000	1.605

a. Predictors: (Constant), lnpenduduk, DAU, lnleverage, AUDIT, lnbelanja, PAD, lnsize

b. Dependent Variable: KINERJA

Hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,01 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 3. Hasil Uji T**

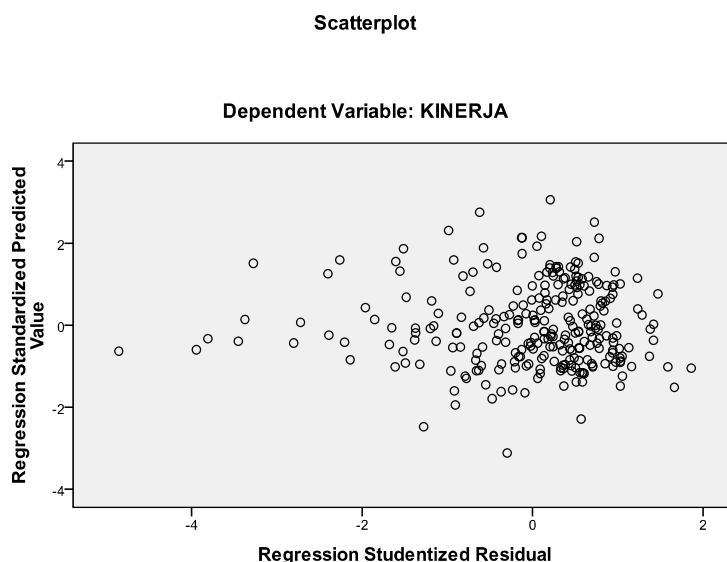
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta		Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.096	1.486		.064	.949		
	DAU	.114	.254	.027	.448	.654	.840	1.190
	PAD	2.651	.732	.227	3.623	.000	.795	1.257
	AUDIT	-.075	.148	-.029	-.507	.612	.937	1.067
	lnsize	.036	.047	.053	.777	.438	.663	1.508
	lnbelanja	-.007	.030	-.013	-.223	.824	.878	1.139
	lnleverage	-.007	.013	-.031	-.545	.586	.956	1.046
	lnpenduduk	.116	.036	.229	3.190	.002	.605	1.654

a. Dependent Variable: KINERJA



Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* yang disajikan pada gambar 3 menunjukkan data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.



**Gambar 3. Hasil Uji Heterskedastisitas**

Hasil pengujian hipotesis dengan regresi berganda ditunjukkan pada tabel 2, dan tabel 3.

Pada tabel 2 diperoleh hasil koefisien determinasi dari nilai *adjusted Rsquare* sebesar 14,2% yang berarti bahwa variabel ukuran/aset, PAD, DAU, belanja, pinjaman, jumlah penduduk, dan hasil audit BPK mempengaruhi kinerja pemerintah daerah sebesar 14,2% sedang sisanya sebesar 85,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Dari tabel 2 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = 0,096 + 0,036\text{Lnsize} + 2,561\text{PAD} + 0,114\text{DAU} - 0,007\text{Lnbelanja} - 0,007\text{Lnleverage} - 0,007\text{Lnleverage} - 0,075\text{AUDIT} + 0,116\text{Ln penduduk}$$

Persamaan regresi tersebut memberikan arti sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 0,096 menunjukkan bila variabel DAU, PAD, hasil audit, Ln size, Lnleverage, Lnbelanja dan Lnpenduduk konstan maka kinerja pemerintah daerah sebesar 0,096
- b. Nilai koefisien regresi DAU sebesar 0,114. Itu berarti jika variabel PAD, hasil audit, lnaset, ln leverage, ln belanja, dan ln jumlah penduduk konstan, sedangkan DAU naik satu satuan maka kinerja pemda akan naik sebesar 0,114
- c. Nilai koefisien regresi variable PAD sebesar 2,561, itu artinya jika variabel DAU, hasil audit, lnaset, ln leverage, lnbelanja, dan ln jumlah penduduk konstan maka kinerja pemda akan naik sebesar 2,561 jika PAD naik 1 satuan

- d. Nilai koefisien regresi variable AUDIT sebesar  $-0,075$ , itu artinya jika variabel DAU, PAD, hasil audit,  $\ln$  aset,  $\ln$  leverage,  $\ln$ belanja, dan  $\ln$  jumlah penduduk konstan maka kinerja pemda akan turun sebesar  $0,075$  jika hasil audit BPK naik 1 satuan
- e. Nilai koefisien regresi variable SIZE sebesar  $0,036$ , itu artinya jika variabel DAU, PAD, hasil audit,  $\ln$  leverage,  $\ln$  belanja, dan  $\ln$  jumlah penduduk konstan maka kinerja pemda akan naik sebesar  $0,036$  jika aset (SIZE) naik 1 satuan
- f. Nilai koefisien regresi variable pinjaman/ $\ln$ leverage sebesar  $-0,007$ , itu artinya jika variabel DAU, PAD, hasil audit,  $\ln$  aset/SIZE,  $\ln$  belanja, dan  $\ln$  jumlah penduduk konstan maka kinerja pemda akan turun sebesar  $0,007$  jika pinjaman naik 1 satuan
- g. Nilai koefisien regresi variable belanja sebesar  $-0,007$ , itu artinya jika variabel DAU, PAD, hasil audit,  $\ln$  aset,  $\ln$  pinjaman (*leverage*), dan  $\ln$  jumlah penduduk konstan maka jika belanja naik 1 satuan kinerja pemda akan turun sebesar  $0,007$
- h. Nilai koefisien regresi variable jumlah penduduk sebesar  $0,116$  itu artinya jika variabel DAU, PAD, hasil audit,  $\ln$  aset,  $\ln$  leverage, dan  $\ln$  belanja konstan maka jika jumlah penduduk naik 1 orang kinerja pemda naik sebesar  $0,116$

### **Hipotesis 1: aset berpengaruh terhadap kinerja pemda**

Dari hasil pengujian hipotesis 1 pada tabel 3 diperoleh hasil bahwa aset (*size*) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang ditunjukkan oleh nilai  $t$  sebesar  $0,053$  dengan tingkat signifikansi  $0,4384 >$  dari  $0,05$ . Hasil Uji variabel aset tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja pemda disebabkan kebanyakan pemerintah daerah memiliki aset yang kurang produktif untuk menciptakan daya saing daerah. Seharusnya aset yang dimiliki daerah lebih diutamakan aset yang bernilai produktif sehingga bisa meningkatkan daya saing dan layanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) dan Widya dan Debby (2012), karena kedua penelitian sebelumnya menemukan bahwa aset berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **Hipotesis 2: pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja pemda**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah, yang dibuktikan dengan nilai  $t$  sebesar  $3,623$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000$  lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . ). Pemerintah daerah yang mempunyai PAD tinggi maka kinerjanya akan makin baik, demikian juga sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sumarjo (2010), dan Widya dan Debby (2012).

### **Hipotesis 3: belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja pemda**

Hasil uji  $t$  untuk variabel belanja daerah diperoleh nilai  $-0,223$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,824 >$   $0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Bahkan dalam pengujian ini ditemukan belanja daerah pengaruhnya negatif terhadap kinerja. Belanja daerah meliputi total belanja baik belanja rutin/operasional dan belanja modal. Hal ini disebabkan belanja daerah lebih banyak terdiri dari belanja rutin/operasional bahkan jika dilihat dari jumlah belanja rutin/operasional sebagian besar dialokasikan dalam belanja pegawai. Belanja pegawai tidak berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widya dan Debby (2012).

#### **Hipotesis 4: *leverage* berpengaruh terhadap kinerja pemda**

Hasil pengujian pada tabel 3 menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai  $t$  sebesar  $-0,545$  dengan nilai signifikansi  $0,856 > 0,05$ . *Leverage* berpengaruh negatif tapi tidak signifikan, ini berarti *leverage* yang tinggi tidak berpengaruh terhadap turunnya kinerja. Hasil ini disebabkan karena jumlah pinjaman yang dimiliki pemerintah tidak digunakan dalam pengembangan pemerintah daerah, akan tetapi digunakan untuk menutup belanja total. Hal ini disebabkan karena untuk investasi pada pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana digunakan belanja modal yang pendanaannya lebih banyak berasal dari dana alokasi khusus yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian yang bertolak belakang dengan penelitian Sumarjo (2010), dan Widya & Debby (2012).

#### **Hipotesis 5: tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda.**

Dari hasil pengujian hipotesis dengan uji  $t$  yang disajikan pada tabel 3. DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda, yang dibuktikan dengan hasil uji  $t$  menunjukkan besarnya nilai  $t$  adalah  $0,448$  dan nilai signifikansinya sebesar  $0,654$ . Karena nilai signifikansi  $> 0,05$  maka DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini diduga pemerintah daerah mengalokasikan DAU untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan layanan minimum kepada masyarakat sehingga kinerja yang dicapai tidak lebih tinggi.

Hasil pengujian ini juga tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) juga Widya dan Debby (2012).

#### **Hipotesis 6: jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja pemda**

Hasil pengujian variabel jumlah penduduk menemukan bukti bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t$  sebesar  $3,190$  dan nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah terlibat dalam pengawasan pelaksanaan

pemerintahan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Sopanah (2003) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap penganggaran.

### **Hipotesis 7: hasil Audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemda**

Hasil pengujian variabel temuan hasil audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena nilai t sebesar -0,507 dan nilai signifikansi 0,612. Nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini diduga karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas internal. Disamping itu juga hasil temuan audit BPK yang tidak selalu ditindak lanjuti oleh pemda Hasil pengujian tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widya dan Debby (2012).

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

- a. Secara bersama-sama variabel ukuran /size pemda, PAD, belanja daerah, pinjaman, DAU, jumlah penduduk, dan hasil audit BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah karena nilai signifikansinya di bawah 0,05.
- b. Secara parsial PAD dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah
- c. Ukuran/size, DAU, belanja daerah, pinjaman, dan hasil audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

### **2. Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

- a. Data yang dipakai hanya satu tahun, sehingga belum mencerminkan kinerja pemerintah yang sebenarnya
- b. Dalam penelitian ini karakteristik pemerintah daerah dilihat dari struktur organisasi, dan lingkungan eksternal sedangkan budaya organisasi belum diteliti

### **3. Saran**

Saran bagi peneliti selanjutnya antara lain:

- a. Menambah variabel independen terutama untuk karakteristik pemda misalnya menambah variabel jumlah anggota dewan, dan budaya organisasi
- b. Menambah tahun amatan tidak hanya dengan data satu tahun tapi dua tahun atau lebih

## **Daftar Pustaka**

- Adi, Priyo Hari. 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah". *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*

- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Undip
- Halim, Abdul. 2001. "Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah." *KOMPAK*. STIE YO. Yogyakarta. 127-146
- Halim, Abdul, 2003, *Bunga Rampai Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Jogjakarta.
- Puspita, Rora dan Martanti, Dwi. 2012. "Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik pemda terhadap tingkat Pengungkapan dan Kualitas informasi dalam website Pemda". *Proceding SNA 15*
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
- Santoso, Singgih. 2001. *SPSS Versi 10 Mengolah Data Statistik secara Profesional*, Jakarta. PT Elek Media Komputindo
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya*.
- Sumarjo, Doni, 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. *Skripsi S-1*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret
- Widya Astuti M dan Debby Fitriyani, 2012. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/Kota di Indonesia Tahun anggaran 2007". *Proceding SNA 15*